



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GINI RATMANTI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI
3. NHK : 222926

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 857.006.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1085 m2/280 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 650.080.000
2. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.128.000
3. Tanah Seluas 1660 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 53.200.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/76 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 63.215.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 54.383.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 225.300.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HADIAH Rp. 5.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.300.000
3. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 442.549.955**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.577.855.955



III. HUTANG

Rp. 65.834.570

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.512.021.385

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.